

## PENYAJIAN LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO

Sriyani<sup>1</sup>, Aisyah Oktantiasari<sup>2</sup>, Chyntia Claudia<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Kebendaharaan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN, <sup>3</sup>Universitas  
Raharja

[sriyani@pknstan.ac.id](mailto:sriyani@pknstan.ac.id), [aisyahoktantia@gmail.com](mailto:aisyahoktantia@gmail.com)

### Abstrak

Paper ini meninjau kesesuaian penyajian laporan operasional terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan penyajian laporan Operasional KPPN Sidoarjo terhadap SAP. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dalam menyusun laporan operasional untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dimana data dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil dari penelitian ini secara umum laporan operasional KPPN Sidoarjo sudah sesuai dengan SAP. KPPN Sidoarjo sudah menggunakan basis akrual dalam penyusunan laporan operasionalnya. Pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan Pendapatan dan beban sudah sesuai dengan PMK No. 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan operasional di KPPN Sidoarjo tidak mengalami kendala sudah menggunakan aplikasi SAKTI. Masih terdapat beberapa kekeliruan dalam pengungkapan yang ada pada CaLK yaitu kesalahan perhitungan sehingga menyebabkan penyajian informasi pada CaLK tidak sesuai dengan informasi yang tersedia pada Laporan Operasional.

**Kata Kunci:** Akuntansi Pemerintah, Laporan Operasional, SAP

### Abstract

*This paper reviews the suitability of the presentation of operational reports to Government Accounting Standards (SAP). This study aims to determine whether there is a significant difference in the presentation of the Sidoarjo KPPN Operational report to SAP. The results of this study are expected to be a means of evaluation in preparing operational reports to improve government financial accountability. The research method used is qualitative where data is collected using library research and field studies by interviews with related parties. The results of this study in general the operational reports of KPPN Sidoarjo are in accordance with SAP. KPPN Sidoarjo has used the accrual basis in preparing its operational reports. Recognition, measurement, as well as presentation and disclosure of income and expenses are in accordance with PMK no. 225/PMK.05/2019 concerning Central Government Accounting Policies. The preparation of operational reports at KPPN Sidoarjo has no problems using the SAKTI application. There are still some errors in the disclosures in CaLK, namely miscalculations that cause the presentation of information on CaLK to be inconsistent with the information available in the Operational Report.*

**Keywords:** Government Accounting, Operational Report, SAP

## 1. Pendahuluan

Pemerintah berupaya dengan cara mengembangkan kebijakan terkait akuntansi pemerintah agar transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dan mengatur keuangan negara dapat ditingkatkan. Dalam menerapkan akuntansi di

suatu pemerintahan, adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dapat dijadikan sebagai standar dan pedoman dalam menyusun laporan keuangan.

Metode pencatatan dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia mengalami perkembangan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai dasar ditetapkannya basis akuntansi kas menuju akrual. Basis akuntansi kas menuju akrual menggunakan basis kas dan basis akrual. Penggunaan basis kas yakni untuk mengakui adanya transaksi terkait pembiayaan, belanja, dan pendapatan, sedangkan penggunaan basis akrual yakni untuk mengakui ekuitas, kewajiban, dan aset. Kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menerapkan basis akuntansi akrual.

Sejak tahun 2015 pelaporan keuangan pemerintah sudah menggunakan sistem berbasis akrual sesuai dengan amanah yang ada di dalam PP nomor 71 tahun 2010. Dalam PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan dijelaskan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah agar dapat menyediakan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, saldo anggaran lebih, arus kas, serta kenaikan/penurunan ekuitas dari suatu entitas pemerintah.

Hasil pemeriksaan membuktikan bahwa persiapan yang dilakukan Kementerian/Lembaga dalam menerapkan SAP basis akrual dianggap masih belum memadai. Hasil pemeriksaan pada 52 dari 83 Kementerian/Lembaga yang sudah memberikan tanggapan adalah sebesar 19,23% Kementerian/Lembaga yang belum mengadakan komunikasi secara internal untuk membahas perencanaan dalam menerapkan SAP berbasis akrual pada tahun 2015. Kemudian sebesar 36,53% Kementerian/Lembaga yang belum melakukan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia dan sebesar 46,15% Kementerian/Lembaga yang belum mengalokasikan anggaran khusus (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, 2014). Hal tersebut mengakibatkan Kementerian/Lembaga mengalami kendala dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Tantangan dalam menerapkan SAP basis akrual diantaranya keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang akuntansi pemerintah, penerapannya yang cukup kompleks karena membutuhkan *IT based system*, sifat yang masih resistensi terhadap perubahan, dan lain-lain.

Basis akrual mengakui adanya transaksi ketika terjadi transaksi meskipun kas masih belum diterima sehingga basis akrual dinilai lebih akurat karena aset, kewajiban, dan ekuitas mudah diukur. Berbeda dengan basis kas yang mengakui transaksi ketika ada kas yang masuk atau keluar sehingga pengakuan pendapatan ketika ada penerimaan kas dan pengakuan beban ketika ada pengeluaran kas.

Basis akrual mempunyai beberapa manfaat yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, mengukur performa, *cash flow*, posisi keuangan, dan dijadikan sebagai pedoman untuk memperoleh suatu keputusan final dalam menjalankan bisnis. Oleh karena itu, laporan keuangan berbasis akrual dinilai bisa menyediakan beberapa informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik daripada basis *Cash Towards Accrual* (CTA)/kas menuju akrual. Karena informasi keuangan dalam yang dihasilkan dapat memudahkan pengguna laporan keuangan dalam menilai dan mengevaluasi kinerja suatu entitas pemerintah dan

mengukur kemampuan pemerintah untuk membiayai kegiatan dan memenuhi kewajiban.

Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan penyajian laporan Operasional KPPN Sidoarjo terhadap SAP. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dalam menyusun laporan operasional untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah.

## **2. Landasan Teoritis**

### **Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip akuntansi yang dijadikan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 yang mendasari penerapan SAP.

Terdapat tiga basis akuntansi dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu basis kas, kas menuju akrual, dan akrual. Pada basis kas pendapatan dicatat ketika ada penerimaan kas di rekening kas umum negara/rekening kas umum daerah. Kemudian ada basis kas menuju akrual yang menggunakan dua macam basis yaitu basis kas untuk mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sedangkan untuk mengakui aset, kewajiban, dan ekuitas menggunakan basis akrual.

Basis akuntansi yang ketiga adalah basis akrual yang terdapat dua macam pelaporan. Pertama, pelaporan finansial yang berbasis akrual ini digunakan untuk mengakui pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Kedua, pelaporan pelaksanaan anggaran digunakan untuk mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berdasarkan basis yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

### **Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi dan bisa menambah ekuitas dan pemerintah yang mengelola penggunaannya demi menyelenggarakan suatu pemerintahan dalam suatu periode. Dalam laporan operasional berisi seluruh informasi tentang kegiatan operasional keuangan. Laporan operasional berguna untuk menyempurnakan laporan keuangan berbasis akrual dalam suatu siklus akuntansi sehingga ada keterkaitan dengan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan neraca.

### **Akuntansi Pendapatan LO**

Laporan operasional mempunyai tujuan untuk menyajikan informasi terkait kegiatan operasional dalam keuangan yang terlihat pada pos pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-LO. Selain itu, laporan operasional juga mempunyai manfaat bagi pengguna dalam melakukan evaluasi pendapatan-LO dan beban pada entitas pemerintahan karena memberikan beberapa informasi yaitu besaran beban yang harus ditanggung oleh pemerintah, mengenai operasi keuangan yang berfungsi untuk menilai performa pemerintah demi tercapainya prinsip efisien, efektif, dan penghematan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya

ekonomi, berfungsi untuk memperkirakan pendapatan-LO yang akan diterima pada periode berikutnya yang digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah, ekuitas yang menurun apabila terjadi defisit operasional dan ekuitas yang meningkat apabila mengalami surplus operasional.

Pendapatan-LO merupakan hak yang dimiliki oleh pemerintah yang bisa menambah ekuitas dalam suatu periode tahun anggaran yang berkaitan dan tidak perlu dibayarkan kembali.

Pada pemerintah pusat pendapatan-LO diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yang terdiri dari pendapatan bukan pajak, pendapatan perpajakan, dan pendapatan hibah, sedangkan pada pemerintah daerah diklasifikasikan berdasarkan asal dan jenis pendapatannya yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pengukuran pendapatan-LO diukur menggunakan asas bruto atau pendapatan dibukukan secara bruto tanpa mengkompensasikan dengan beban-beban yang ada. Tetapi terdapat pengecualian apabila nilai pengurang pendapatan-LO bruto mempunyai sifat yang variabel dan juga tidak bisa diestimasi karena prosesnya yang belum selesai.

Pendapatan-LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan berdasarkan jenis pendapatannya. Penjelasan terkait rincian lebih detail pada pos-pos pendapatan-LO harus diungkapkan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) agar menyajikan informasi yang memadai.

Tabel 1. Jurnal Pendapatan\_LO

<b>Akun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
313121	Diterima dari Entitas Lain	Rp0	
4xxxxx	Pendapatan-LO		Rp0

Sumber: PMK Nomor 220/PMK.05/2016

Beban menurut PMK No 225/PMK.05/2019 dan PSAP 12 adalah terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau terdapat biaya yang timbul akibat dari transaksi tersebut dalam suatu periode dan mengakibatkan menurunnya suatu ekuitas baik itu berupa pengeluaran, adanya penggunaan aset, dan timbulnya suatu kewajiban.

Berdasarkan PMK No 225/PMK.05/2019 beban dibedakan berdasarkan klasifikasi ekonomi yang mengelompokkan menurut jenis beban yaitu: beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban transfer, beban lain-lain, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, dan beban penyisihan piutang tidak tertagih.

Beban diakui ketika terjadi pengalihan hak dari satu pihak lain kepada pemerintah tanpa ada arus kas keluar, saat terjadi konsumsi/penggunaan aset yaitu ketika ada arus kas keluar kepada pihak lain dan tanpa didahului suatu kewajiban

yang timbul dan penggunaan aset non kas dalam kegiatan operasional, dan ketika manfaat ekonomi atau potensi jasa mengalami penurunan yang berhubungan dengan penggunaan aset terkait/berlalu waktu.

Beban disajikan dalam laporan operasional suatu entitas akuntansi maupun entitas pelaporan dan diungkap dalam Catatan atau Laporan Keuangan (CaLK) keterangan terkait materilitas, rincian, dan data lainnya sehingga laporan keuangan yang disajikan transparan dan akuntabel.

Tabel 2. Jurnal Beban

Akun	Uraian	Debit	Kredit
51xxxx	Beban Pegawai	Rp282.405.000	
51xxxx	Beban persediaan	Rp79.419.445	
51xxxx	Beban barang dan jasa	Rp930.418.684	
51xxxx	Beban Pemeliharaan	Rp297.497.537	
51xxxx	Beban Perjalanan Dinas	Rp124.349.224	
51xxxx	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp290.647.642	
313111	Ditagikan ke Entitas Lain		Rp2.004.737.532

Sumber: PMK Nomor 220/PMK.05/2016

### **Akuntansi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

Menurut PSAP 12, hasil selisih lebih dari pengurangan antara pendapatan dengan beban dalam suatu periode disebut surplus dari kegiatan non operasional, sedangkan hasil selisih kurang dari pengurangan antara pendapatan dengan beban dalam suatu periode disebut defisit. Dalam kegiatan non operasional mencakup pos pendapatan dan beban yang bersifat tidak rutin. Pos-pos dalam pendapatan dan beban pada kegiatan non operasional mencakup surplus/defisit hasil penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa merupakan hasil dari pengurangan antara surplus/defisit kegiatan operasional dengan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

### **Akuntansi Pos Luar Biasa**

Dalam PSAP 12 tentang Laporan Operasional telah dijelaskan terkait karakteristik dari pos luar biasa yaitu:

- Peristiwa yang tidak bisa diprediksi akan terjadi pada awal tahun anggaran,
- Peristiwa yang tidak diinginkan terjadi berulang kali, dan
- Peristiwa yang berada di luar kontrol pemerintah.

### **3. Metode**

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data Penelitian ini berfokus dalam meninjau kesesuaian implementasi data yang diperoleh di lapangan terhadap kebijakan dan peraturan yang mengikat data tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari KPPN Sidoarjo.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan yang dilakukan penulis bertujuan untuk memperoleh informasi terkait latar belakang dan kajian teoritis. Studi kepustakaan yang digunakan penulis adalah mengkaji teori-teori yang relevan dengan cara memperoleh landasan teori yang bersumber dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara dan observasi secara. Wawancara dilakukan secara terstruktur yakni Penulis mengajukan berbagai pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat secara sistematis untuk mendapatkan informasi terkait dengan Laporan Operasional di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidoarjo. Observasi dilakukan dengan mengamati, mencatat, dan menganalisis terhadap data dan fakta yang telah diperoleh terkait Laporan Operasional di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidoarjo.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

KPPN Sidoarjo adalah satker yang ada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dan mempunyai tanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPB Provinsi Jawa Timur. KPPN Sidoarjo mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan wewenang sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) untuk dapat mendistribusikan pembiayaan atas beban anggaran negara dan melakukan penatausahaan dalam baik dalam penerimaan maupun pengeluaran anggaran yang melalui atau dari kas negara.

KPPN Sidoarjo mempunyai visi yaitu menjadi pengelola perbendaharaan negara yang bisa unggul tingkat dunia di suatu daerah. Dimana Visi tersebut dijabarkan dalam misi mengelola kas dan investasi dengan hati-hati, optimal, dan efisien, mewujudkan prinsip yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan anggaran, melaksanakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan negara yang bersifat dapat dipertanggungjawabkan, terbuka, dan tepat waktu serta mendorong kemampuan yang bisa mendukung sistem perbendaharaan agar andal, professional, dan modern.

KPPN Sidoarjo menggunakan basis akrual dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan berupa neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. KPPN Sidoarjo juga menggunakan basis kas untuk menyusun laporan realisasi anggaran. Hal ini sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan PMK No 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

#### **Tinjauan atas Struktur Laporan Operasional**

Struktur laporan operasional pada KPPN Sidoarjo terdiri dari beberapa pos pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO.

Pos-pos yang terdapat pada Laporan Operasional KPPN Sidoarjo sudah sesuai dengan struktur Laporan Operasional yang ada pada PSAP 12.

### **Tinjauan atas Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah yang diakui dapat menambah ekuitas dalam suatu periode tahun anggaran dan pendapatan tersebut tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenisnya yaitu pendapatan perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan pendapatan dari hibah. Definisi tersebut sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Bab XI PMK No 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PSAP 12.

Pendapatan-LO diakui ketika hak untuk menagih pendapatan itu timbul, apabila pendapatan-LO didapatkan sebagai bentuk imbalan atas pelayanan yang sudah diberikan maka pengakuannya ketika hak untuk menagih itu timbul, dan ketika direalisasi yaitu hak yang sudah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan.

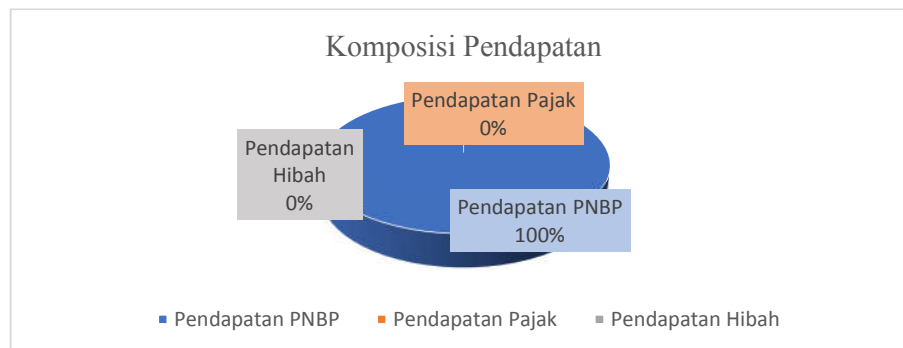
Contoh pengakuan pendapatan-LO di KPPN Sidoarjo adalah pengakuan pendapatan denda yang dicatat ketika diterbitkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan, pendapatan yang berasal dari sewa gedung diakui secara proporsional antara nilai dengan periode atau waktu sewa, dan lain-lain. Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan-LO sudah sesuai dengan PSAP 12.

Akuntansi pendapatan-LO menggunakan asas bruto dimana pendapatan dibukukan secara bruto atau tidak dicatat jumlah bersih yang setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Namun, ada pengecualian apabila nilai pengurang pendapatan-LO bruto mempunyai sifat yang variabel dan tidak bisa diperkirakan karena prosesnya yang belum selesai. Kebijakan akuntansi terkait pengukuran pendapatan-LO sudah sesuai dengan PMK No 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PSAP 12.

Penyajian dan pengungkapan pendapatan-LO pada KPPN Sidoarjo yaitu pendapatan-LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan berdasarkan jenisnya yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan pendapatan hibah. Informasi lebih lanjut atau lebih detail terkait pendapatan-LO diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang menjabarkan komponen pendapatan-LO dan masing-masing besarnya. Penyajian pendapatan-LO dalam bentuk satuan mata uang rupiah. Kebijakan akuntansi terkait penyajian dan pengungkapan pendapatan-LO sudah sesuai dengan PMK No 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PSAP 12.

Komposisi pendapatan pada KPPN Sidoarjo terdiri dari seratus persen (100%) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, KPPN Sidoarjo tidak memperoleh pendapatan PNBP pada tahun 2018 dan 2019.

Gambar 1. Komposisi Pendapatan KPPN Sidoarjo



Sumber: Diolah Penulis

Jumlah pendapatan pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Karena pada tahun 2019 tidak ada pendapatan PNBP yang diperoleh KPPN Sidoarjo sehingga pendapatan-LO tidak mengalami kenaikan maupun penurunan pendapatan-LO.

### Tinjauan atas Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah manfaat ekonomi atau potensi jasa yang menurun atau biaya yang timbul dari transaksi selama periode berkenaan yang mengakibatkan menurunnya ekuitas yang bisa berupa pengeluaran, penggunaan aset, maupun timbulnya kewajiban. Pengelompokan beban didasarkan pada jenis beban yang terdiri dari empat belas jenis beban yaitu beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban subsidi, beban hibah, beban bunga, beban pemeliharaan, beban barang dan jasa, beban persediaan, beban pegawai, beban perjalanan dinas, beban transfer, beban bantuan sosial, beban lain-lain, beban penyisihan piutang tak tertagih, dan beban penyusutan dan amortisasi. Definisi tersebut sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Bab XII PMK No 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PSAP 12.

Pengakuan beban pada saat terjadi penurunan manfaat baik ekonomi atau potensi jasa untuk penyusutan pada aset tetap, dan amortisasi dalam aset tidak berwujud, dan adanya penyisihan piutang. Terjadi penggunaan aset untuk pembayaran kepada pihak lain yang tidak didahului oleh timbulnya suatu kewajiban dan penggunaan aset non-kas untuk kegiatan operasional pemerintah. Contohnya seperti penggunaan persediaan, pembayaran gaji pegawai, dan pembayaran biaya perjalanan dinas. Pada saat kewajiban timbul. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh KPPN Sidoarjo untuk pengakuan beban sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Bab XII PMK No 225/PMK.05/2019 dan PSAP 12.

Masing-masing beban mempunyai pengukuran yang berbeda-beda yaitu: Beban pegawai telah diakui sebesar tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai yang didasarkan pada daftar gaji, dokumen kepegawaian, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara atas pegawai yang bersangkutan dan telah disetujui oleh KPA/PPK.



Beban persediaan dicatat sebesar penggunaan persediaan sesuai dengan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan. Kemudian pada akhir tahun dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil *opname* fisik jika terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan. Beban barang dan jasa dicatat sejumlah resume tagihan belanja, tagihan kewajiban pembayaran dan belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang sudah disetujui oleh KPA/PPK, dan perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset. Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan yang sudah disetujui oleh KPA/PPK, dan penggunaan persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan. Beban Perjalanan Dinas (perjadin) dicatat sejumlah resume tagihan dan/atau tagihan kewajiban pembayaran oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK. Beban pihak ketiga dicatat sebesar resume tagihan dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja oleh pihak ketiga yang sudah disetujui KPA/PPK. Beban bansos dicatat senilai resume tagihan belanja bansos dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja bansos oleh pihak ketiga yang sudah disetujui KPA/PPK. Beban penyusutan ini dicatat senilai perhitungan akuntansi penyusutan aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional kecuali tanah dan amortisasi untuk aset tidak berwujud. Beban penyisihan piutang dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang tersebut.

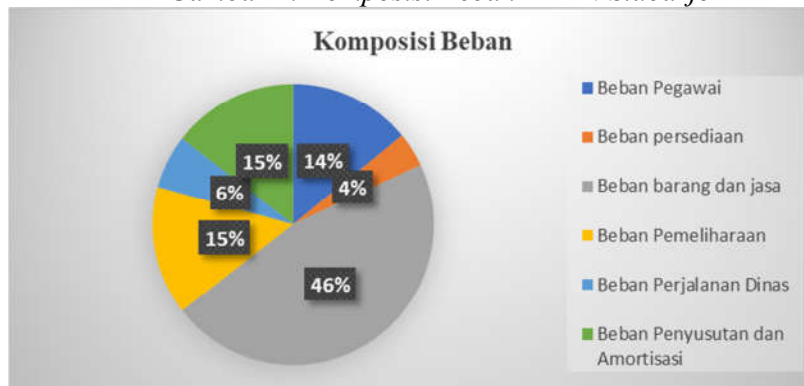
Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik disimpulkan bahwa secara garis besar pengukuran atas beban dicatat sesuai dengan nominal yang tertera pada resume tagihan. Pengukuran tersebut dapat dikatakan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Bab XII PMK 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PSAP 12.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Penyajian beban dalam laporan operasional dikelompokkan menurut jenisnya. Tambahan penjelasan terkait analisis, rincian, dan informasi tambahan lainnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penyajian dan pengungkapan tersebut sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Bab XII PMK No 225/PMK.05/2019.

Komposisi beban di KPPN Sidoarjo yang didominasi oleh beban barang dan jasa yaitu sebesar 46%. Karena banyak konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan perkantoran. Kemudian beban pegawai sebesar 14%, beban persediaan sebesar 4%, beban pemeliharaan sebesar 15%, beban perjadin sebesar 6%, dan beban penyusutan dan amortisasi sebesar 15%.

Gambar 2. Komposisi Beban KPPN Sidoarjo



Sumber: Diolah Penulis

Jumlah beban pegawai pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp282.405.000 dan Rp336.293.000. Pada pos beban gaji dan tunjangan tercatat sejumlah Rp0. Hal itu disebabkan oleh pembayaran gaji dan tunjangan yang sudah terpusat mulai tahun 2016. Beban Pegawai mengalami penurunan sebesar 16% dibandingkan tahun sebelumnya.

Beban persediaan adalah beban yang timbul karena penggunaan barang-barang yang sifatnya habis pakai dan barang-barang yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan yang berasal dari hasil produksi. Jumlah beban persediaan pada tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp79.419.445 dan Rp84.473.402. Jumlah tersebut hanya berasal dari pos beban persediaan konsumsi saja. Beban persediaan menurun sebesar enam persen jika dibandingkan dengan tahun 2018, karena jumlah beban persediaan konsumsi yang menurun. Beban Barang dan Jasa.

Beban barang dan jasa merupakan beban yang timbul karena penggunaan barang dan/atau jasa untuk menjalankan aktivitas pada entitas serta beban lainnya yang disebabkan karena adanya penggunaan alokasi untuk belanja barang operasional atau non operasional dan jasa yang digunakan untuk keperluan kegiatan kantor. Total beban barang jasa pada tahun 2019 dan 2018 adalah Rp930.418.684 dan Rp888.567.247. Jumlah tersebut didominasi oleh pos beban barang. Beban barang dan jasa meningkat sebesar 4,71% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beban Pemeliharaan.

Beban pemeliharaan yaitu beban yang digunakan untuk mempertahankan aset lainnya atau aset tetap agar kondisinya tetap terjaga dengan baik. Contoh beban pemeliharaan adalah biaya pengecatan untuk pemeliharaan untuk gedung, biaya penggantian oli kendaraan dinas, biaya *service* AC, dan lain-lain. Total beban pemeliharaan pada tahun 2019 dan 2018 adalah Rp297.497.537 dan Rp299.191.885. Komposisi terbesar dalam beban pemeliharaan adalah beban pemeliharaan untuk gedung dan bangunan yaitu sebesar Rp160.080.500. Beban pemeliharaan pada tahun 2019 menurun sebesar 0,57% dari tahun 2018. Hal itu dikarenakan adanya penghematan pada pemeliharaan gedung dan bangunan.

Terdapat kekeliruan perhitungan pada kolom naik/turun untuk pos beban persediaan bahan untuk pemeliharaan dan beban pemeliharaan lainnya. Pada pos beban persediaan bahan untuk pemeliharaan seharusnya turun sebesar -91%.

Kemudian pada pos beban pemeliharaan lainnya seharusnya sebesar seratus persen (100%), karena meningkat seratus persen (100%) dari tahun 2018. Beban Perjalanan Dinas/Perjadin.

Beban perjadin yakni beban yang timbul karena adanya pegawai yang melakukan perjalanan dinas untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan jabatan. Perjalanan dinas ada tiga macam yaitu perjadin jabatan, perjadin pindah, dan perjadin tetap. Beban perjadin terdiri dari biaya sewa untuk kendaraan, uang harian yang mencakup uang makan, yang saku, dan biaya untuk transport lokal, kemudian ada biaya sewa kendaraan, biaya sewa penginapan, dan biaya transportasi serta uang representatif. Total beban perjalanan dinas pada tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp124.349.224 dan Rp84.301.500. Beban perjalanan dinas pada tahun 2019 meningkat cukup besar jika dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 47,51%. Hal itu disebabkan oleh frekuensi pembinaan satker mitra kerja yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya kegiatan *capacity building* di luar kota sebanyak dua kali.

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat yakni beban yang berasal dari pemerintah bisa berupa barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat demi mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan dari pemberian barang dalam beban ini bukan termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial. Karena bukan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial. Jumlah beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga beban ini tidak mengalami kenaikan/penurunan.

Beban bantuan sosial yaitu beban dari pemerintah yang dalam bentuk bantuan bisa berupa barang, uang atau jasa yang diberikan untuk masyarakat guna menghindari terjadinya risiko sosial. Jumlah beban bansos pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga dapat disimpulkan beban bansos tidak mengalami kenaikan/penurunan.

Beban penyusutan yaitu beban untuk mencatat adanya penyusutan nilai aset tetap selama masa manfaat. Beban amortisasi adalah beban yang digunakan untuk mengakui alokasi adanya penurunan manfaat ekonomi pada aset tidak berwujud. Berikut adalah rincian beban penyusutan dan amortisasi. Jumlah beban penyusutan dan amortisasi pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp290.647.642 dan Rp 260.254.797. Pada tahun 2019 beban ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Persentase kenaikannya hingga mencapai 11,68%. Hal ini terjadi karena beban penyusutan atas peralatan dan mesin yang mengalami peningkatan cukup drastis dari Rp100.989.918 menjadi Rp144.119.781.

Terdapat kekurangan pada penyajian dan pengungkapan yang ada di CaLK yaitu pada kolom naik/turun yang tidak menyatakan perhitungan sebenarnya. Hal ini menyebabkan informasi yang ada pada CaLK terkait beban penyusutan dan amortisasi tidak sejalan dengan informasi yang ada pada laporan operasional.

Beban penyisihan piutang tak tertagih adalah beban yang mencatat perkiraan piutang yang tidak akan tertagih dalam suatu periode. Jumlah beban penyisihan piutang tak tertagih pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar

Rp0 dan Rp0. Hal ini terjadi karena KPPN Sidoarjo tidak memiliki piutang pada tahun tersebut.

### Tinjauan Kebijakan Akuntansi Surplus/Defisit atas Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang bersifat tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi suatu entitas. Penyajian dan pengungkapan surplus/defisit dari kegiatan non operasional sudah sesuai dengan PSAP 12.

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional menurun sebesar 87,47%. Terdapat kekurangan dalam penyajian di CaLK yaitu perhitungan kenaikan/penurunan pada pos pendapatan penyesuaian nilai persediaan dan beban dari kegiatan operasional lainnya. Seharusnya pos pendapatan penyesuaian nilai persediaan mengalami kenaikan sebesar 357%, sedangkan beban dari kegiatan non operasional lainnya mengalami kenaikan sangat besar yaitu 952%. Informasi yang disajikan pada CaLK tidak relevan dengan informasi yang ada pada laporan operasional.

### Tinjauan Kebijakan Akuntansi Pos Luar Biasa

Pos luar biasa terdiri dari pos beban dan pendapatan yang tidak bisa diestimasi akan terjadi, bersifat jarang terjadi, dan di luar kontrol entitas. Pada tahun 2019 dan 2018 tidak terdapat saldo pada pos pendapatan PNBP, beban perjalanan dinas, dan beban persediaan yang ada pada pos luar biasa sehingga tidak mengalami kenaikan/penurunan Penyajian dan pengungkapan pos luar biasa sudah sesuai dengan pedoman yang tercantum pada PSAP 12.

Gambar 3. Laporan Operasional KPPN Sidoarjo

URAIAN	CATATAN	2019	2018
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	282,405,000	336,293,000
Beban Persediaan	D.3	79,419,445	84,473,402
Beban Barang dan Jasa	D.4	930,418,684	888,567,247
Beban Pemeliharaan	D.5	297,497,537	299,191,885
Beban Perjalanan Dinas	D.6	124,349,224	84,301,500
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	290,647,642	260,254,797
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>2,004,737,532</b>	<b>1,953,081,831</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(2,004,737,532)</b>	<b>(1,953,081,831)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.11		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	1,800,000
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		4,345,000	951,300
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya		4,048,405	384,650
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>296,595</b>	<b>566,620</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(2,004,440,937)</b>	<b>(1,950,715,211)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(2,004,440,937)</b>	<b>(1,950,715,211)</b>

Sumber: Laporan Operasional KPPN Sidoarjo (2019)

### **Tinjauan Kelengkapan Informasi dan Kesesuaian Format Penyajian Laporan Operasional**

Format laporan operasional pada KPPN Sidoarjo yang ada pada laporan keuangan tahun 2019 telah sesuai dengan format penyajian laporan operasional menurut PSAP 12. Penyajian laporan operasional mencakup nama entitas, cakupan entitas pelaporan, nama laporan, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, bentuk mata uang, dan satuan angka.

### **Tinjauan atas Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan pada KPPN Sidoarjo disusun oleh seksi Subbagian Umum. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan KPPN Sidoarjo sebagai satker, sedangkan laporan keuangan sebagai Kuasa BUN disusun oleh seksi Verifikasi dan Akuntansi. Keduanya tentu saja berbeda, untuk laporan keuangan sebagai satker atau tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang disajikan hanya meliputi laporan keuangan satker saja, sedangkan untuk laporan keuangan sebagai Kuasa BUN atau tingkat Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Daerah yang meliputi laporan keuangan semua satker yang wilayah pembayarannya berada di KPPN Sidoarjo.

Dalam menyusun laporan keuangan semua satker di Kementerian Keuangan sudah menggunakan aplikasi SAKTI dan E-Rekon LK sehingga tidak perlu menggunakan aplikasi SAIBA lagi. Modul GLP menghasilkan laporan keuangan yang datanya bersumber dari semua modul di aplikasi SAKTI. Oleh karena itu, tingkat validitas dan kelengkapan data dalam laporan keuangan tergantung dari tingkat keabsahan dan keutuhan data semua modul.

Ketika proses rekonsiliasi satker tidak perlu melakukan *upload* data ke aplikasi E-Rekon LK. Karena data yang terdapat di aplikasi SAKTI akan dilakukan *push* data secara terpusat dan otomatis ke aplikasi E-Rekon LK. Jika syarat *push* data telah dipenuhi maka saat itu satker sudah melakukan tutup periode dan waktunya aplikasi E-Rekon LK buka periode untuk rekonsiliasi. Tutup periode pada aplikasi SAKTI dilakukan saat semua data laporan keuangan sudah dipastikan benar.

### **Tinjauan atas Permasalahan dalam Penyusunan Laporan Operasional**

Dalam proses penyusunan laporan operasional di KPPN Sidoarjo secara teknis tidak ada permasalahan. Karena di KPPN Sidoarjo sudah menggunakan aplikasi SAKTI. Penggunaan aplikasi SAKTI meminimalisir terjadinya kesalahan karena semua modul sudah terintegrasi. Modul yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan adalah modul GLP dan sumber datanya diperoleh dari modul komitmen, anggaran, pembayaran, bendahara, piutang, aset tetap, persediaan, dan modul GLP.

Laporan keuangan harus ditelaah terlebih dahulu oleh penyusun sebelum disampaikan ke Kanwil. Review laporan keuangan meliputi kelengkapan informasi dan ketepatan penyajian laporan keuangan, kesesuaiannya dengan SAP, kesesuaiannya dengan aplikasi e-Rekon LK, review bagian-bagian laporan keuangan, dan juga mereview antar laporan keuangan yang menunjukkan adanya hubungan antara laporan barang milik negara dengan transaksi aktual intra dalam

laporan keuangan. Review dilakukan untuk mengukur kewajaran nilai yang tercantum dalam laporan keuangan, memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan lengkap, dan penjelasan yang diungkap dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) sudah memadai.

Aplikasi e-Rekon LK melakukan review laporan keuangan yaitu. Review dapat dilakukan tanpa harus menunggu sampai laporan keuangan selesai disusun yaitu dengan memonitor data secara harian pada Aplikasi e-Rekon LK. Masih ada kekurangan terkait dengan pengungkapan yang ada catatan atas laporan keuangan dimana terdapat kesalahan perhitungan pada kolom persentase kenaikan/penurunan dengan periode sebelumnya. Hal itu menyebabkan adanya ketidaksamaan antara laporan keuangan yang telah dibukukan dengan laporan keuangan yang berasal dari SAKTI.

### 5. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa KPPN Sidoarjo telah menggunakan basis Akrual dalam penyusunan Laporan Operasional sesuai dengan PMK No 225/PMK.05/2019. Struktur laporan operasional di KPPN Sidoarjo sudah sesuai dengan PSAP 12 tentang laporan operasional.

Pengakuan pendapatan-LO telah sesuai dengan pedoman yang ada pada PSAP 12. Dasar pengukuran yang digunakan oleh KPPN Sidoarjo adalah asas bruto. Kemudian pengukuran yang digunakan adalah satuan mata uang rupiah. Apabila ada transaksi dalam bentuk mata uang asing maka harus diubah menjadi bentuk satuan mata uang rupiah. Kebijakan pengukuran ini sudah sesuai dengan pedoman yang tercantum pada PMK No 225/PMK.05/2019 dan PSAP 12.

Penyajian pendapatan-LO pada Laporan Operasional di KPPN Sidoarjo berdasarkan sumber pendapatan yang dikelompokkan menjadi pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, dan pendapatan hibah. Pada KPPN Sidoarjo pendapatan yang dimiliki hanya bersumber dari PNBPN. Penyajian setiap sumber pendapatan KPPN Sidoarjo sudah sesuai dengan PMK No 225/PMK.05/2019 dan PSAP 12.

Pengakuan beban-LO terjadi ketika ada konsumsi aset, kewajiban timbul, dan ketika mengalami penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pengakuan tersebut sudah sesuai dengan PMK No 225/PMK.05/2019 dan PSAP 12.

Pengukuran masing-masing beban memiliki pengukuran yang berbeda-beda. Namun, sebagian besar pengukuran beban dilakukan berdasarkan nilai nominal yang tercantum pada resume tagihan dari masing-masing beban. Kebijakan pengukuran ini sudah sesuai dengan PMK No 225/PMK.05/2019.

Penyajian beban digolongkan berdasarkan klasifikasi ekonomi yang dikelompokkan menurut jenis beban yang terdiri dari empat belas jenis beban. Kebijakan ini sudah sesuai dengan format penyajian beban yang tercantum pada PMK No 225/PMK.05/2019.

Penyajian surplus/defisit kegiatan dari operasional beserta komponen-komponen yang terdapat dalam laporan operasional KPPN Sidoarjo sudah sesuai dengan pedoman yang ada pada PSAP 12. Penyajian pos luar biasa pada laporan

operasional di KPPN Sidoarjo sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada PSAP 12.

Format penyajian laporan operasional di KPPN Sidoarjo sudah sesuai dengan ketentuan format laporan operasional yang tercantum pada PSAP 12. Format tersebut mencakup informasi terkait nama pelaporan, cakupan entitas, nama entitas, periode, satuan angka, dan bentuk mata uang.

Penyusunan laporan operasional di KPPN Sidoarjo secara keseluruhan tidak mengalami kendala yang berarti. Hal ini dikarenakan semua laporan keuangan sudah menggunakan aplikasi SAKTI sehingga kemungkinannya kecil apabila ada kesalahan. Laporan keuangan dihasilkan dari modul GLP. Di samping itu, KPPN Sidoarjo juga melakukan penelaahan/review terlebih dahulu sebelum laporan keuangan disampaikan ke Kanwil. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan sudah benar.

Namun, terdapat beberapa kekeliruan dalam pengungkapan yang ada pada CaLK. Ada kesalahan dalam perhitungan kolom yang menyajikan presentase kenaikan/penurunan masing-masing pos dengan periode sebelumnya seperti pada pos beban persediaan bahan untuk pemeliharaan dan beban pemeliharaan lainnya. Selain itu, ada juga pos beban penyusutan dan amortisasi yang tidak disajikan besaran persentase kenaikan/penurunan dengan periode sebelumnya. Hal ini menyebabkan penyajian informasi pada CaLK tidak sesuai dengan informasi yang tersedia pada Laporan Operasional.

#### **Daftar Pustaka**

- Anindita, G. R. (2019). Tinjauan Atas Laporan Operasional dalam rangka Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Kantor Balai Besar Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta.
- Arifin. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Bailey, K. D. (1994). In *Methods of Social Research* (p. 254). USA: The Free Press.
- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. (2014). *Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI di Indonesia*.
- Hadad, M., & Nainggolan, E. U. (2016). Strategi penerapan akuntansi berbasis akruaI: Penciptaan tata kelola pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. *Majalah Treasury*, 1(2), 20.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 186: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (1988). In *Metode Penelitian* (p. 291). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zelmiyanti, R. (2015). Perkembangan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Sektor Pemerintah Indonesia. 68-72.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 12 tentang Laporan Operasional*.
- Kementerian Keuangan. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat*
- Kementerian Keuangan. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat*.
- Kementerian Keuangan. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*.